



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK MATERI SIDANG PARIPURNA KHUSUS**

**Gedung Nusantara, 23 Agustus 2006**

**LAGU INDONESIA RAYA**

**MENGHENINGKAN CIPTA**

**MC**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**Sidang Dewan Perwakilan Daerah dan Hadirin Yang Kami Hormati,**

Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta sejenak mengenang jasa dan berdoa bagi para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk bangsa dan negara. Seraya kita memohon kekuatan dan kemampuan untuk mengemban amanah rakyat, membangun bangsa yang aman, sentosa, adil, makmur dan sejahtera. Semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita. **MENGHENINGKAN CIPTA, MULAI!**

**LAGU MENGHENINGKAN CIPTA**

Mengheningkan cipta selesai.

*Assalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Yang Terhormat:

- Saudara Presiden Republik Indonesia;
- Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Rekan-rekan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan Pimpinan Lembaga Negara;
- Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para Pejabat Negara lainnya;
- Yang Mulia para Duta Besar/Kepala Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional;

- Para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- Para Pangdam dan Kapolda se-Indonesia;
- Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, hadirin, serta undangan yang berbahagia.

Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir dan telah menandatangani daftar hadir ... orang Anggota. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD kuorum telah tercapai, dan sidang telah memenuhi syarat untuk dimulai.

Maka dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahiim*, Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebelum kami menyampaikan pidato pembukaan, ingin kami sampaikan bahwa sejak berdirinya, DPD telah kehilangan empat anggota yang telah mendahului kita berpulang ke Rahmatullah yaitu Drs. H. Abdul Halim Harahap dan Raja Inal Siregar dari Provinsi Sumatera Utara, Drs. H. Yokoyama Sinapoy dari Provinsi Sulawesi Tenggara, dan H. Abi Kusno Nachran dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kami mohon kesediaan para hadirin semua mendoakan semoga arwah para almarhum mendapat tempat yang sebaik-baiknya disisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ridho dan perlindungan-Nya. Amin.

### **Sidang Dewan Perwakilan Daerah Yang Kami Muliakan,**

Bersama kita, hadir Presiden Republik Indonesia yang telah memenuhi undangan DPD untuk menyampaikan Pidato tentang Pembangunan Daerah dalam RAPBN 2007, serta kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang menyangkut daerah dan hubungan pusat dengan daerah.

Telah hadir pula ditengah-tengah kita Wakil Presiden, para Pimpinan Lembaga dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu serta para undangan lainnya dari dalam maupun luar negeri.

Secara khusus kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para Pimpinan Pemerintah di daerah, yaitu para Gubernur, Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten dan Kota serta para Pangdam dan Kapolda dari seluruh Indonesia. Kehadiran para pimpinan pemerintahan dan pemangku pembangunan di daerah ini adalah untuk mendengarkan secara langsung penjelasan Presiden sebagai Pimpinan Negara dan Kepala Pemerintah mengenai rencana pembangunan di daerah, serta berbagai kebijakan pemerintah mengenai daerah.

Kami juga mengundang organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat, yang mempunyai peran dalam perkembangan demokrasi, serta pembangunan dan masalah-masalah daerah, sehingga secara bersama-sama, seluruh kekuatan bangsa dapat mendukung upaya peningkatan kemajuan daerah sebagai bagian esensial dari kemajuan nasional.

Ingin pula kami sampaikan bahwa Sidang Paripurna kali ini didukung oleh Korps Musik Kepolisian Republik Indonesia dan paduan suara Para Gita dari Universitas Indonesia. Paduan suara Para Gita ini sejak tadi telah mengumandangkan lagu-lagu perjuangan dan lagu-lagu daerah sesuai dengan suasana kebhinekatunggalikaan yang menjadi ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.

### **Sidang Yang Kami Muliakan,**

Mengawali sambutan pengantar ini, atas nama Pimpinan dan Anggota DPD, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden atas kesediaan memenuhi undangan kami. Acara ini untuk kedua kalinya diselenggarakan dan diharapkan dapat berkembang menjadi konvensi ketatanegaraan dan menjadi agenda nasional setiap tahun.

Dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2006 yang lalu, Presiden telah menyampaikan Keterangan Pemerintah Tentang RAPBN 2007 serta Nota Keuangannya. Presiden juga telah memberikan evaluasi mengenai situasi ekonomi nasional dewasa ini. Dari keterangan tersebut tergambar adanya berbagai perkembangan yang patut kita catat.

Kita menyadari betapa Saudara Presiden serta jajarannya sejak awal telah dihadapkan kepada banyak persoalan. Selain mewarisi krisis ekonomi dari masa pemerintah yang lalu, yang sampai kini masih belum sepenuhnya dilalui, pada bulan-bulan pertamanya pemerintah yang baru ini harus menghadapi musibah besar, yaitu tsunami di Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Belum lagi dampak dari tsunami itu dapat

diatasi, negara kita telah dihadapkan pada berbagai bencana dan malapetaka di berbagai daerah bahkan hingga saat ini, seperti bencana alam di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Pantai Selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, luapan lumpur panas di Jawa Timur, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, dan bencana-bencana diberbagai daerah lainnya.

Selain itu bangsa kita juga dihadapkan pada perkembangan ekonomi global yang tidak menguntungkan khususnya kenaikan harga minyak, serta berjangkitnya wabah flu burung yang juga berpotensi menjadi sebuah bencana besar jika tidak ditangani secara tepat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga harus membangun sistem pengelolaan negara yang baik dan efisien dan sekaligus menghilangkan faktor-faktor yang menghalangi kemajuan seperti korupsi dan ketidakefisienan birokrasi. Selain itu, masyarakat dan aparat pemerintah belum sepenuhnya dapat berfungsi dalam sebuah sistem yang terbuka, demokratis dan berdasarkan hukum.

Maka dapatlah dimengerti bahwa jerih payah upaya pemerintah seringkali tidak memperoleh apresiasi yang selayaknya, karena demikian banyaknya masalah yang harus dihadapi secara simultan, sehingga kemajuan-kemajuan yang ada itupun seakan menjadi tidak tampak. Apalagi jika kita membandingkan keadaan ekonomi kita dengan negara tetangga dan negara-negara lain yang juga diserang oleh krisis ekonomi bersama dengan kita, yang dewasa ini bukan hanya telah pulih kembali ekonominya, bahkan sekarang telah tumbuh lebih maju lagi dibanding sebelum krisis.

### **Sidang Yang Kami Muliakan,**

#### **Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan Hadirin Yang Berbahagia.**

Kami menyadari besarnya tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah, namun sebagai wakil rakyat, DPD yang salah satu fungsi utamanya adalah menampung aspirasi masyarakat, wajib juga menyampaikan pandangan kritis sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan.

Kebijakan ekonomi makro amat penting untuk membangun kemantapan ekonomi negara sebagai landasan bagi kesinambungan pembangunan. Pemerintah telah menunjukkan kesungguhan dan keberhasilannya dalam membangun kebijakan ekonomi makro, sehingga tercipta stabilitas moneter yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia .

Meskipun demikian, dari pengamatan DPD, dalam kunjungan-kunjungan kami ke daerah, kebijakan ekonomi makro tersebut dirasakan belum betul-betul berhasil membangkitkan ekonomi di sektor riil. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih belum menunjukkan tanda-tanda teratasi, dan kerawanan sosial masih terus berlangsung. Pertumbuhan ekonomi utamanya didukung oleh peningkatan konsumsi ketimbang oleh investasi yang baru. Oleh karena itu, DPD berpendapat kebijakan ekonomi makro, terutama kebijaksanaan fiskal perlu dikaitkan dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan antar daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi bukan hanya pada tingkat nasional tetapi juga regional.

Proses desentralisasi yang sudah berjalan, masih perlu terus diperbaiki. Desentralisasi fiskal yang tepat dapat mendorong efisiensi dan kebangkitan sektor riil, dengan mendekatkan pusat-pusat pelayanan dan jasa kepada masyarakat, dan memperpendek mata rantai antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu pembangunan pemerintahan yang baik di daerah harus menjadi prioritas dan terstruktur dengan jelas dalam APBN.

Komitmen itu harus tercermin dalam peningkatan yang berarti dalam alokasi belanja daerah dalam APBN 2007. Dalam kerangka itu kebijakan dana dekonsentrasi patut dikaji ulang kesesuaiannya dengan upaya untuk mengembangkan otonomi daerah yang kuat, nyata dan bertanggungjawab. Belanja pemerintah pusat yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diserahkan ke daerah dalam rangka otonomi daerah harus dikembalikan ke belanja daerah baik dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Kekayaan sumber alam telah digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam Dana Bagi Hasil sumber alam (DBH), tetapi ketersediaan sumber alam tidak merata di semua daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) ini membawa keberuntungan yang banyak bagi daerah penghasil, tetapi menimbulkan kesenjangan pendapatan yang besar antara daerah penghasil dengan daerah lainnya. Oleh karenanya, daerah yang tidak memiliki sumberdaya alam dan tidak mempunyai Dana Alokasi Umum (DAU) yang cukup, memerlukan

dukungan yang lebih besar untuk dapat bangun dari kemiskinan dan ketertinggalan. Ini merupakan tanggung jawab yang penting dari pemerintah pusat. Secara khusus kami minta perhatian terhadap daerah-daerah pasca konflik dan masih berpotensi konflik agar dapat segera pulih kembali. DPD juga meminta perhatian pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi daerah-daerah perbatasan dan provinsi-provinsi kepulauan.

Selain kegiatan pembangunan yang secara penuh dilaksanakan oleh pemerintah, perlu lebih dikembangkan peranserta masyarakat untuk membangun kesejahteraannya. Keberhasilan pemerintah membangun daerah harus diukur dan ditunjukkan dengan indikator keberdayaan masyarakat untuk membangun dirinya secara mandiri. Kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah dan layanan publik harus dikembangkan secara berimbang untuk membangun masyarakat yang kuat.

Sehubungan dengan itu, dan dalam rangka membantu mendorong investor ke daerah, DPD merencanakan untuk menyelenggarakan temu investor dengan daerah, dalam sebuah kegiatan yaitu *Indonesian Regional Investment Forum*. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada awal bulan November dan direncanakan dibuka oleh Presiden, diikuti oleh provinsi maupun kabupaten dan kota yang telah siap dengan rencana promosi investasinya.

Salah satu masalah yang sering menghambat lancarnya arus investasi adalah pertanahan. Permasalahan pertanahan yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak patut mendapat perhatian khusus pemerintah di pusat maupun di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi. Masalah di bidang agraria dan pertanahan ini perlu sungguh-sungguh ditangani untuk menjamin bahwa masalah tanah tidak menjadi penghalang bagi pembangunan dan kemajuan bangsa tetapi juga menjamin hak dan rasa keadilan rakyat. Saat ini DPD sedang menyusun RUU pertanahan yang semangatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

### **Sidang Dewan Perwakilan Daerah Yang Kami Muliakan,**

Saat ini bangsa kita tengah menghadapi tiga masalah berat di bidang ekonomi yang satu sama lain berkaitan yakni kemiskinan, pangan, dan energi. Di satu sisi telah terjadi penambahan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yang lahan pertaniannya mengalami pengalihan fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, dan jalan, serta terjadi pula degradasi lahan. Untuk mengatasi masalah struktural di atas, diperlukan kebijakan tata ruang yang memberikan jaminan terhadap dua hal penting yaitu, ketahanan pangan dan kebijakan energi nasional.

Pemantapan ketahanan pangan melibatkan banyak pelaku serta mencakup interaksi antar wilayah, oleh sebab itu pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui suatu kerjasama kolektif dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya masyarakat produsen, pengolah, pemasar dan konsumen pangan.

Di bidang energi, kami sangat menghargai inisiatif pemerintah untuk mendorong energi hayati pengganti BBM sebagai langkah awal yang baik dengan penegasan bahwa energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) haruslah menjadi arus utama (*mainstream*) pembangunan energi di Indonesia. Namun, kami menyarankan agar pengembangan sumber energi hayati ini sebaiknya juga dikaitkan dengan penguatan ketahanan pangan, karena banyak sumber daya energi hayati juga dapat berfungsi sebagai sumber daya pangan.

Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan, perlu dibangun akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin agar menjadi produktif, antara lain melalui pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu bagian dalam sistem keuangan nasional. Usaha mikro sebagai bagian terbesar dari pelaku usaha di Indonesia telah terbukti memberikan kontribusi besar terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat, DPD sedang berinisiatif untuk mengajukan usul RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. Landasan utama kebijakan ini merujuk pada ketentuan Pasal 33 UUD, artinya bahwa esensi perekonomian Indonesia seharusnya berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Upaya mengatasi kemiskinan, harus dimulai di sektor-sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap sasaran itu, yaitu sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan yang dikemas dalam kesatuan terintegrasi dengan sektor pendukungnya khususnya infrastruktur.

Untuk itu, kemampuan daerah harus ditingkatkan dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan sektor-sektor itu secara terintegrasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, dan sekaligus dalam jumlah besar meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas kerja, mobilitas penduduk kembali ke desa, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan lokal. Namun perlu menjadi perhatian pula bahwa alokasi DAK membutuhkan dana pendamping yang harus disediakan oleh daerah, dan daerah miskin seringkali tidak memiliki cukup dana untuk itu, sehingga menjadi tidak berhak mendapat alokasi DAK. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk memberikan dana pendamping tersebut dari DAK, khusus untuk daerah-daerah miskin.

Di bidang pendidikan, DPD tetap berpegang pada prinsip bahwa 20% anggaran pendapatan pusat maupun daerah harus ditujukan untuk pendidikan. Dilain pihak meningkatnya anggaran pendidikan harus mampu meningkatkan peranserta masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, dan meningkatkan kesetaraan dan keterkaitan antara berbagai jenjang pendidikan, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan untuk meningkatkan kecerdasan dan nilai moral bangsa di samping produktivitasnya.

### **Sidang Yang Kami Muliakan,**

Indonesia terletak di wilayah rawan bencana alam, oleh karena itu pemerintah harus membangun kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bencana alam dan dampaknya sedini mungkin. Bukan hanya menanggulangi dan merehabilitasi setelah bencana terjadi, tetapi membantu mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan mengambil langkah konkrit untuk menghindari kerugian yang besar. Usaha tersebut termasuk perencanaan dan pembinaan lokasi permukiman di wilayah rawan bencana, relokasi pemukiman ke daerah yang aman, dan membangun organisasi yang kuat dan responsif untuk mengantisipasi bencana dan penanggulangannya.

Karena bencana sering terjadi di daerah-daerah terpencil, maka aspek komunikasi dan transportasi menjadi sangat penting dalam manajemen pasca bencana. Kita masih ingat pada waktu terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, kita sangat dibantu oleh penyediaan alat-alat transportasi dari negara-negara asing.

Dimensi transportasi bagi Indonesia, penting bukan hanya sebagai sarana mobilitas atau mobilisasi penduduk tetapi memiliki arti yang jauh lebih prinsip, dalam mendukung jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat daerah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah, DPD mendukung usaha Pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastuktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

DPD hanya ingin mengingatkan bahwa karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga Pemerintah akan melibatkan swasta, maka harus dijamin bahwa investasi swasta dalam bidang infrastruktur dapat dipikul biaya penggunaannya oleh masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

DPD juga mendesak pemerintah agar dalam pembangunan infrastruktur dari manapun sumber pembiayaannya, digunakan sebesar-besarnya produksi dalam negeri, baik produksi barang maupun jasa. Proyek-proyek infrastruktur yang bermilyar dolar itu seharusnya merupakan pasar potensial yang besar bagi kontraktor, produksi industri dan bahan-bahan dalam negeri, seperti aspal buton untuk pembangunan jalan-jalan. Hal-hal yang sudah bisa kita lakukan dan hasilkan sendiri jangan dibiarkan diambil oleh pihak asing. Dengan jalan demikian, kita membangun kekuatan dan kemandirian ekonomi nasional.

Terkait dengan soal prasarana dan transportasi, DPD melihat aspek kemaritiman amatlah penting bagi kedaulatan negara, kegiatan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan itu, provinsi-provinsi yang berkarakter gugus kepulauan memerlukan pendekatan pembangunan yang berlainan dengan wilayah dengan luas

daratan yang besar. Aspek penting bagi kedaulatan negara juga berkaitan dengan posisi Kepulauan Indonesia dan laut sebagai perekat nasional. Aspek kemaritiman yang berkaitan erat dengan kegiatan

ekonomi adalah prasarana atau infrastruktur pelabuhan dan interkoneksi dalam jaringan dan sistem navigasi internasional. Sehubungan dengan itu, DPD telah menyelesaikan RUU tentang Kepelabuhan, yang mempertegas keterpautan maritim dan infrastruktur vital di daerah belakangnya (*hinterland*).

### **Sidang Yang Kami Muliakan,**

### **Hadirin Yang Kami Hormati,**

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai otonomi daerah dan berbagai masalah yang terkait, yang merupakan tanggung jawab DPD sesuai dengan amanat Konstitusi, sehubungan pula dengan hadirnya para pemimpin daerah dan pemangku pembangunan di forum yang mulia ini.

Otonomi daerah pada prinsipnya diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki derajat kesejahteraan serta kelayakan hidup rakyat, dimana pemerintahan dan pembangunan dikelola dalam proses-proses yang demokratis.

Dalam proses-proses pengelolaan daerah seperti itu, Pemerintah Daerah memiliki ruang bebas untuk berkeaktifitas membuat kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda), dengan melibatkan *stakeholders* yang ada di daerahnya. Muara dari semua kebijakan pemerintah daerah tersebut dan perda yang dibuat oleh pemerintah daerah, tidak lain adalah untuk menjamin terlayannya kebutuhan atau kepentingan masyarakat daerah, berkembang-terbangunnya daerah dimana kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan menjadi tujuan akhirnya. Namun, sasaran-sasaran otonomi daerah tersebut pada kenyataannya di atas belum tercapai karena berbagai hal. Di satu pihak, masih ada berbagai peraturan perundangan di tingkat pusat yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah serta tidak menyelesaikan tumpang tindih kewenangan antar berbagai instansi pemerintah pusat. Menurut catatan yang kami peroleh dari Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) ada 25 (dua puluh lima) undang-undang sektoral yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di sisi lain masih terdapat cukup banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak berorientasi kepada kepentingan umum.

Berdasarkan berbagai temuan itu, diharapkan Pemerintah dapat memberikan teladan dalam penyusunan peraturan perundangan yang konsisten dengan prinsip-prinsip otonomi daerah seraya juga memberikan panduan agar pembuatan Perda senantiasa berorientasi pada pelayanan umum, dan pembuatannya harus lebih partisipatif.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, pembenahan peraturan sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di segala tingkatan. Dengan rezim peraturan yang konsisten, non diskriminatif serta berorientasi pada pelayanan umum terdapat peluang untuk memperbaiki kinerja birokrasi, mengatasi korupsi serta mengatasi kecenderungan primordial dan politisasi jabatan. Dalam rangka itu, DPD menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dengan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan ditandatanganinya Memorandum Kesepahaman tanggal 15 Agustus 2006. Diharapkan kerjasama ini bisa bersinergi dengan prinsip-prinsip pembangunan tata pemerintahan yang baik seperti disebut di atas.

Masalah lain yang harus di hadapi dalam otonomi daerah adalah kecenderungan pemekaran wilayah yang berlebihan. Dalam banyak hal pemekaran wilayah yang terjadi cenderung memunculkan kesulitan pelayanan umum sehingga sudah saatnya pemerintah melakukan beberapa langkah strategis antara lain membuat penelitian tentang jumlah provinsi, kabupaten atau kota yang ideal bagi Indonesia masa depan. Pertimbangan geografis, demografis, strategi politik dalam menjamin integrasi NKRI serta kelayakan ekonomi merupakan faktor-faktor yang menentukan dalam menyusun rancangan tersebut.

Pada akhirnya perlu ada keberanian politik untuk melakukan kajian khusus terhadap daerah-daerah otonom yang secara finansial menghadapi masalah dalam membiayai daerahnya secara berkelanjutan. Ini berarti ke depan kita tidak lagi hanya berbicara masalah pemekaran daerah melainkan juga sekaligus dengan penggabungan daerah-daerah otonom. Dalam konteks ini, setidaknya kita berbicara soal strategi baru manajemen pembangunan wilayah yang bisa mewujudkan tujuan hakiki otonomi daerah. Dalam rangka strategi baru di atas, berkembang wacana bahwa DPD dapat berperan sebagai lembaga pertimbangan

otonomi daerah. Dengan demikian pertimbangan otonomi daerah tidak semata-mata berada di tangan pemerintah.

### **Sidang Yang Kami Muliakan,**

Kita patut bersyukur karena Aceh telah menjadi kawasan damai, dan fase konflik horizontal maupun vertikal sudah berlalu. Undang-undang Pemerintahan Aceh, sebagai bagian dari upaya solusi damai pasca perjanjian Helsinki setahun yang lalu, juga sudah disahkan dimana dalam proses-prosesnya DPD berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan.

Di Papua pun kita sudah melangkah lebih maju mengarah pada penciptaan suasana yang lebih kondusif, terutama setelah dilaksanakannya pemilihan dua kepala daerah di wilayah itu secara demokratis dan damai. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melantik Gubernur/Wakil Gubernur yang terpilih di kedua wilayah itu, yakni Gubernur/Wakil Gubernur Papua dan Gubernur/Wakil Gubernur Irian Jaya Barat.

Dengan dilantiknya kedua Kepala Daerah definitif di Tanah Papua itu, maka kini kita memulai babak dan harapan baru untuk terciptanya pengelolaan pemerintahan dan otonomi khusus di Tanah Papua secara lebih baik.

Ke depan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, diharapkan kedua pemerintahan daerah di Tanah Papua itu bisa duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, utamanya yang terkait dengan pembagian atau alokasi dana otsus untuk kedua daerah. Pemerintah pusat diharapkan secara proaktif dapat memediasi penyelesaian masalah itu.

Kondisi geografis yang memiliki derajat kesulitan yang tinggi, adanya daerah-daerah dengan masyarakat lokalnya yang terpencil, dan rentang kendali pemerintah yang begitu rumit, meniscayakan kita untuk mengadakan pendekatan yang berbeda di Papua dengan pendekatan di daerah Indonesia lainnya. Dalam kerangka itulah kita harus menjawab kelompok-kelompok tertentu baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang bersuara minor terhadap keberadaan Papua dalam NKRI. Kalau saudara-saudara kita di Papua sudah merasakan kemajuan dan hasil-hasil pembangunannya, maka rakyat Papua sendirilah yang pertama-tama akan membela NKRI dan melakukan "perlawanan" terhadap mereka yang melakukan propaganda provokatif.

DPD juga mengharapkan agar masalah pemerintahan yang terjadi di daerah lain misalnya di Provinsi Lampung dapat segera diselesaikan secara adil dan bermartabat. Dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, DPD memandang penting penataan perbatasan wilayah. Konflik perbatasan wilayah akan mengganggu stabilitas dan ketenangan bekerja serta menguras energi yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang produktif. Oleh karena itu, DPD memandang perlu adanya sebuah undang-undang tentang perbatasan negara.

### **Sidang Yang Kami Muliakan,**

Kesenjangan bukan hanya terjadi antardaerah atau antara golongan pendapatan, namun juga antargender. Berbagai statistik menunjukkan bahwa kaum perempuan belum sepenuhnya berperan sesuai dengan potensinya, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Meskipun di bidang politik, kita memang boleh bangga pernah memiliki seorang Presiden perempuan yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri.

Dalam rangka memperkuat peran perempuan Indonesia di bidang politik, khususnya dalam fungsi sebagai wakil rakyat, para anggota parlemen perempuan dari DPR dan DPD telah membentuk sebuah kaukus. Kaukus Parlemen Perempuan Indonesia ini akan mengadakan pertemuan atau lokakarya yang dihadiri oleh bukan hanya anggota DPR dan DPD perempuan tetapi juga anggota-anggota perempuan di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Presiden telah dilaporkan mengenai rencana ini dan telah bersedia memberi dukungan dan membuka acara. Kami mengharapkan para gubernur, bupati, dan walikota juga dapat mendukung keikutsertaan para anggota perempuan dari DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

## **Hadirin Yang Kami Hormati,**

Tibalah kami pada bagian terakhir pidato pembukaan Sidang Paripurna Khusus DPD ini.

Sidang ini diselenggarakan satu minggu setelah kita memperingati hari kemerdekaan yang ke 61. Sebagai sebuah refleksi, perjalanan sejarah bangsa kita menunjukkan bahwa cita-cita persatuan yang turut melahirkan dan membentuk jiwa dan semangat Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, tidaklah terjadi dengan begitu saja dan tidak juga tanpa tantangan. Sejak bulan-bulan awal kemerdekaan bahkan sampai usia republik ini mencapai lebih dari 60 tahun kesatuan dan ketahanan persatuan kita terus menerus diuji.

Maka menjadi amanat bagi kita sebagai penerus perjuangan untuk memupuk kebhinekaan dan keanekaragaman sebagai unsur-unsur yang memperkuat ke-Indonesia-an dan ikatan kebangsaan. Bagi kami para Anggota DPD ini merupakan hal yang hakiki, karena terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah di bangun di atas landasan idiil untuk memadukan kebhinekaan dengan wawasan kebangsaan, dan wawasan kedaerahan dengan wawasan ke-Indonesiaan.

Setelah 60 tahun sejak terbentuknya negara kita akhirnya disadari dan disepakati bahwa sistem legislatif kita tidak cukup hanya terdiri atas satu majelis, oleh karena beragamnya kepentingan yang perlu disatu-padukan agar menghasilkan yang terbaik bagi bangsa secara keseluruhan maupun bagi masyarakat di daerah yang mungkin karena posisi minoritas, ketertinggalan ekonomi, atau perkembangan SDM, kepentingannya tidak terepresentasikan secara adil dan selayaknya pada proses pengambilan keputusan secara nasional. Para Anggota DPD dan masyarakat yang kami wakili sangat berterima kasih dan menghargai sikap Saudara Presiden yang sejak awal telah menunjukkan komitmen untuk membangun hubungan yang sinergis dan harmonis antara berbagai lembaga negara yang membentuk sistem ketatanegaraan kita berdasarkan UUD 1945 setelah diamandemen.

Menjadi harapan kita semua, hubungan yang harmonis dan konstruktif antara DPD dengan Presiden dapat terus ditingkatkan dalam ikhtiar kita untuk membawa bangsa ini maju ke depan dan mengatasi berbagai persoalan besar yang menghadang di muka kita. Harapan yang sama juga kami sampaikan kepada DPR dan semua lembaga negara lainnya untuk melangkah ke depan secara bersama-sama guna membangun pola hubungan yang saling mengisi demi tanggung jawab kepada rakyat yang telah mempercayakan penyelenggaraan negara dan dengan demikian nasib mereka kepada kita.

Kehadiran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah memasuki masa hampir dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut sebagai lembaga negara yang dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah, DPD telah mewarnai wacana dan merespons berbagai permasalahan yang timbul di daerah-daerah.

Sebagai lembaga yang sama sekali baru, dengan kewenangan yang serba terbatas, hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, dengan waktu yang banyak dibutuhkan untuk menyusun mekanisme kerja dan menciptakan tradisi dan kebiasaan sebagaimana layaknya sebuah lembaga parlemen, DPD telah menghasilkan 47 (empat puluh tujuh) keputusan yang terdiri atas 2 (dua) usul RUU, 15 (lima belas) pandangan dan pendapat, dan 2 (dua) pertimbangan atas berbagai rancangan undang-undang, 19 (sembilan belas) hasil pengawasan, dan 9 (sembilan) keputusan yang berkaitan dengan anggaran. Hasil kerja DPD tersebut secara resmi telah disampaikan kepada DPR diantaranya terdapat beberapa rancangan undang-undang yang menjadi usul inisiatif yang merupakan wewenang DPD berdasarkan UUD. Mengingat semua hasil kerja DPD bermuara di DPR, maka sekarang terpulang kepada DPR akan diapakan hasil kerja DPD tersebut.

Untuk mengefektifkan posisi DPD dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat, seluruh Anggota DPD telah sepakat untuk membangun peran DPD melalui perubahan UUD 1945. Kesepakatan ini telah kami sampaikan kepada Pimpinan MPR, meskipun belum mencapai jumlah suara yang minimal untuk menyelenggarakan Sidang MPR. Dengan peran DPD yang lebih bermakna, diharapkan keberadaan lembaga ini sungguh-sungguh dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Selain itu, keberadaan DPD diharapkan dapat memperkuat sistem parlemen dan pada gilirannya memperkuat demokrasi di Indonesia.

Adanya lembaga legislatif dua kamar memang baru bagi bangsa kita, kecuali dalam waktu yang singkat semasa RIS. Namun di dunia sistem ini sama tuanya dengan sistem parlementer itu sendiri. Hampir semua negara demokrasi yang besar, baik itu besar penduduknya maupun luas wilayahnya, apakah menganut bentuk negara federal atau kesatuan, menerapkan sistem perwakilan dua kamar. Negara demokrasi yang memiliki kemajemukan etnis, agama atau suku banyak memilih sistem perwakilan dua kamar. Indonesia termasuk negara demokrasi besar yang majemuk terakhir yang menganut sistem ini. Dengan adanya majelis legislatif yang kedua, diharapkan terjadi *checks and balances* bukan hanya antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun juga di dalam cabang legislatif itu sendiri. Apabila DPR terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui partai-partai dan berdasar atas jumlah penduduk, maka DPD terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung atas dasar perorangan dengan jumlah yang sama untuk tiap daerah tanpa dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

Tidak bisa setiap tahun atau setiap tiga tahun diubah. Tetapi juga tidak bisa dihalangi apabila ada kebutuhan dankehendak yang kuat untuk mengubah.

Dengan komposisi ini, diharapkan dapat terjadi keseimbangan dalam lembaga perwakilan antara keterwakilan partai dan non partai dan antara wilayah yang penduduknya besar dengan yang kecil.

Kami menyadari bahwa UUD 1945 adalah dasar yang paling dasar dari sebuah negara. Tidak bisa gampang saja diubah. Untuk itu memang haruslah ada getaran atau tekanan politik yang kuat dari masyarakat yang dapat memotivasi para elit politik, yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan dapat tidaknya UUD diubah, untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Maka melalui forum ini kami ingin menggugah masyarakat, melalui para elit politiknya, organisasi-organisasi masyarakat dan *civil society*, para akademisi, peneliti, cendekiawan, pengamat, mahasiswa, pendeknya semua unsur pembentuk opini masyarakat untuk membahas secara luas dan terbuka mengenai peranan DPD atau mengenai sistem legislatif yang bagaimana yang tepat bagi demokrasi dan sistem ketatanegaraan bangsa kita.

**Sidang Dewan Perwakilan Daerah Yang Kami Hormati,**

**Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Hadirin Yang Berbahagia,**

Demikian sambutan kami dalam Sidang Paripurna ini. Selanjutnya kami persilakan Saudara Presiden untuk menyampaikan Pidato tentang Pembangunan Daerah dalam RAPBN Tahun Anggaran 2007.

## PIDATO PRESIDEN

**Sidang Dewan Perwakilan Daerah dan Hadirin Yang Kami Hormati,**

Demikianlah kita telah mendengarkan uraian Presiden Republik Indonesia mengenai aspek-aspek penting pembangunan daerah dalam RAPBN 2007 serta berbagai masalah dan kebijakan pemerintah yang menyangkut daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Keterangan Pemerintah tersebut akan kami pelajari dan dijadikan bahan dalam pembicaraan Alat-alat Kelengkapan DPD dengan para menteri dalam rapat-rapat kerja yang segera akan kami selenggarakan. Kepada Saudara Presiden sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Selanjutnya perlu kami sampaikan pula bahwa nanti siang, pada pukul 14.00 keterangan yang disampaikan oleh Presiden dalam Sidang ini akan dilanjutkan dengan penjelasan lebih rinci mengenai RAPBN 2007 dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri di Gedung Nusantara V. Para Gubernur, Bupati dan Walikota, kami harapkan untuk dapat hadir dalam acara tersebut.

Sebelum menutup Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah ini, marilah bersama-sama kita berdoa kehadirat *Allah Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, agar bangsa kita di bawah kepemimpinan Saudara Presiden, diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang

begitu berat. Kepada Saudara Faisal Mahmud, Anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Tengah kami persilakan untuk memimpin doa.

## PEMBACAAN DOA

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Faisal Mahmud, yang telah memimpin doa kita bersama. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini.

Demikianlah rangkaian acara Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah telah kita laksanakan secara khidmat. Akhirnya, dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbi' alamin*, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka Mendengarkan Pidato Presiden tentang Pembangunan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007, kami **TUTUP**.

*Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*